**VISI**

**Terselenggaranya Optimalisasi Pelayanan Publik di Kecamatan Burau**

**menuju Luwu Timur Terkemuka 2021**

**PENJABARAN VISI**

Untuk mewujudkan Misi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, maka perlu dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional, adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Burau adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Mewujudkan SDM aparatur pemerintah kecamatan yang berkualitas
3. Terlaksananya pelayanan prima
4. Sasaran
5. Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat
6. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kecamatan

**MISI**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Misi** |
| 1 | Misi pertama : Mewujudkan peningkatan pelayanan publik |
| 2 | Misi Kedua : Meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan Burau secara efektif, transparan dan akuntabel |

**TUJUAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Tujuan** |
| Misi 1 Mewujudkan peningkatan pelayanan publik | |
| 1 | Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan |
| 2 | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah kecamatan |
| Misi 2 Meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan Burau secara efektif, transparan dan akuntabel | |
| 2.1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan |

**SASARAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Sasaran** |
| Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Burau |
| Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah kecamatan | |
| 2.1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah kecamatan |
| Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan | |
| 3.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan |

**INDIKATOR SASARAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator kinerja | satuan | IKU |
| Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Burau | | | |
| 1.1 | Indeks pelayanan / kepuasan masyarakat | Nilai |  |
| Sasaran 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah kecamatan | | | |
| 2.1 | Persentase capaian kinerja pada tiap seksi | % |  |
| Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan | | | |
| 3.1 | Nilai AKIP kecamatan |  |  |

**Target Indikator Kinerja Utama tahun 2016 s.d 2021 Kecamatan Burau**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja Utama** | **Formulasi** |
| 1  2 | Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat  Cakupan capaian kinerja mendukung pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban (jumlah total cakupan capaian kinerja mendukung pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban) | Sesuai dengan SK Menpan No 16 tahun 2004 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No 25 tahun 2004  Jumlah cakupan capaian kinerja mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa  Jumlah cakupan capaian kinerja mendukung pemerintahan  Jumlah cakupan capaian kinerja mendukung ketentraman dan ketertiban dibagi tiga di kali 100% |

**Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan , arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2011 – 2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur antara lain, pendidikan, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

a. Pertumbuhan ekonomi didominasi oleh satu sektor saja yaitu sektor pertambangan.

b. Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan laut, darat dan udara.

c. Rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak

d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan PHBS.

e. Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

f. Rendahnya daya saing dan produksi usaha pertanian, perkebunan dan peternakan

g. Tidak sinkronnya antara pembukaan lahan sawah baru dengan ketersediaan irigasi.

h. Ketersediaan rumah layak huni.